

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Arifin Soeriaatmadja, *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2015.
- C S T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Ibrahim R, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Joko Purnomo (dkk.), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2017.
- Lembaga Administrasi Negara, *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Jakarta, 2009
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.
- Muhadam Labolo, *Dialektika Ilmu Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moh Fadli, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Pers, Malang, 2011.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Rafael Raga Manan, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Widjaja, *Pemerintahan desa/marga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Winarno, *Paradikma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003.

#### B. Jurnal

- Akhmad Marjuki, Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2017, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.
- Diah Aryanti Sapto Warsi dan Kalis Handayani, “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Studi Pada Pemerintah Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten”, *The Journal Of Business and Management*, Volume 2. Nomor 1, Februari 2019, Yogyakarta.
- Fahrul Abd. Muid, Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, Nomor 1, Juni 2010, Ternate.
- Haposan Sialagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.18, No.2, Juli 2016, Medan.
- Sita Agustina, “Analisis tentang Pengaturan oleh Pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.5, No.2, Desember 2014, Malang.

#### C. Skripsi dan Tesis

- Ali Ulumudin, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018.
- Wiwin Windarsih, Penegakan Hukum Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Tesis, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017.

#### D. Internet

Adrian Puspawijaya (dkk), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam laman <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudes.pdf>, hlm 48 diakses pada 14 Mei 2019.

Agus Sunaryanto, Indonesia Corruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, dalam laman [https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook\\_desa\\_2018\\_-\\_icw.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf), diakses pada tanggal 4 Januari 2020.

Almas Sjafrina, "Indonesia Corruption Watch", *cegah korupsi dana desa*, dalam laman <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 1 Mei 2019.

BPKP, *Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes*, dalam laman <http://www.bpkp.go.id/sakd.bpkp>, diakses pada 1 Desember 2019.

Dedet Zulthauzallam, *Jenis-Jenis Pengawasan*, dalam laman <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, diakses pada 20 Januari 2020,

ICW, *Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa*, Agustus 2017, dalam laman

<https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

Ihsanuddin, *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*, dalam laman <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>, diakses pada 1 Mei 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 8 November 2019.

Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdescinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-desa-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019.

Siti Rodiah, *Dana Desa untuk Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam laman <https://www.kompasiana.com/jesuissirodd/5bdc1c1843322f146e2aa634/dana-desa-untuk-pembangunan-dan-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada 29 Agustus 2019.

Yusuf Adji, *Penyalahgunaan Dana Desa: Oknum Kades di Subang Ditetapkan Jadi Tersangka*, dalam laman <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/19/penyalahgunaan-dana-desa-oknum-kades-di-subang-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses pada 04 Mei 2019.